



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan rahmat-Nya jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan tugas-tugas secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan serta banyak menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 adalah Dokumen sebagai Pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan 1 (Satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala dan beberapa kekeliruan yang mungkin dialami, tentunya kami sangat mengharapkan koreksi, saran dan masukan dalam perbaikan yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 kami sampaikan semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi atas segala upaya kita Amin.

Geragai, 20 Juli 2024

KEPALA DINAS



AGUS SADIKIN
Pemula Utama Muda/IV.c
NIP. 196605061985121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	18
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3. Program Dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	16
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	21
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	21
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Pada Renstra 2021-2026.....	24
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan tuntutan reformasi yang bersamaan dengan praktek otonomi daerah, tuntutan terhadap pentingnya perbaikan penyelenggaraan otonomi tetap mengemuka. Pemerintah sebagai penyelenggara wewenang yang diamanatkan perlahan-lahan secara politis melaksanakan perbaikan secara terencana terhadap semua tuntutan masyarakat luas. Sehingga segala bentuk perubahan diawali dengan munculnya Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang dijadikan pedoman penyelenggaraan yang lebih baik.

Satu hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah mutlak diwujudkan. Hanya dengan diselenggarakannya tata pemerintahan yang baik akan didapat satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang membuat penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang sebelumnya 2 (dua) SKPD yaitu: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi bergabung 1 SKPD yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan juga merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala

dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang kemudian menghasilkan suatu Rancangan Awal Renja instansi pemerintah, yang setidaknya memuat program dan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Komponen–komponen Renja ini mengacu pada RENSTRA Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis–strategis untuk mengimplementasikan sasaran–sasaran Dinas yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang menjadi tantangan.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 memuat indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan ideal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten TanjungJabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Periode 1 (satu) tahun sebagai Implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1. Pelaksanaan Pelayanan Perangkat
2. Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan
3. Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perkebunan dan Peternakan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/Kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog/Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Relisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA Tahun 2023	Realisasi RENJA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERTANIAN									
	Dinas Perkebunan dan Peternakan									
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Bina	0,82		0,63	0,03	4,76	0,73	0,29	39,73
		Kelompok Petani (%)								
015.001	Keg. Pelatihan	Jumlah Kelompok			3	3	100	0	0	0
	Petani dan Pelaku	Tani yang dibina								
	Agribisnis	Dan dilatih dalam								
		Beternak (Kelompok)								
015.003	Keg. Peningkatan	Jumlah Lembaga			5	5	100	5	0	0
	Kemampuan	Petani Perkebunan								
	Lembaga Petani	Yang dibina (Kelompok)								
015.006	Pekan Nasional	Terlaksananya			0	0	0	1	0	0
	Kelompok Tani	Kegiatan PENAS								
	Nelayan Andalan	KTNA (Kegiatan)								
	(PENAS KTNA)									
015.008	Keg. Penilaian	Jumlah Kriteria			7	6	86	0	0	0
	Lomba-lomba	Penilaian Lomba-								
	Peternakan	Lomba Peternakan								
		(Kriteria)								
016.	Program	Persentase	0		0	0	0	0	0	0
	Peningkatan	Peningkatan								
	Ketahanan	Ketahanan Pangan								
	Pangan	(%)								
	(Pertanian/Per									
	Kebunan)									

016.032	Kegiatan	Jumlah Bantuan			40.000	13.140	33	0	0	0
	Pengembangan	Bibit Perkebunan								
	Kawasan dan	(Batang)								
	Peningkatan									
	Usaha Masyarakat									
	Di Bidang									
	Perkebunan									
016.041	Kegiatan	Luas Areal			150	39	26	150	0	0
	Pengolahan	Pengolahan Tata								
	Tata Air Mikro	Air Mikro (Ha)								
017	Program	Jumlah Pelaksanaan	5		5	0	0	6	0	0
	Peningkatan	Pameran/Promosi								
	Pemasaran Hasil	Produk Perkebunan								
	Produksi	(Kali)								
	Pertanian/									
	Perkebunan	Terlaksananya	5		5	0	0	6	0	0
		Promosi/Pameran								
		Luar Daerah/Luar								
		Provinsi (Kali)								
017.016	Kegiatan	Jumlah dilaksanakannya			0	0	0	6	0	0
	Promosi atas Hasil	Pameran/Promosi								
	Produksi	Atas Hasil Produksi								
	Perkebunan	Perkebunan Daerah								
	Daerah	(Kali)								
019	Program	Produktivitas	1.169		1.165	1.156	99	1.167	1.156	99
	Peningkatan	Kelapa Dalam								
	Produksi	(Kg/Ha)								
	Pertanian/	Produktivitas Pinang	512		486	478	98	499	478	96
	Perkebunan	(Kg/Ha)								
		Produktivitas Kopi	517		502	543	108	510	543	106
		(Kg/Ha)								
019.003	Kegiatan	Jumlah Bibit Unggul			0	0	0	1000	200	20
	Pengembangan	Yang dikembangkan								
	Bibit Unggul	(Batang)								
	Pertanian/									
	Perkebunan									
019.057	Kegiatan	Jumlah Bibit Unggul			0	0	0	40.000	12.500	31
	Peningkatan	Yang disalurkan								
	Produksi dan	(Batang)								
	Produktivitas									
	Perkebunan									
019.058	Kegiatan	Luas Areal			0	0	0	150	0	0
	Pengembangan	Pengembangan								
	Tata Air Mikro	Tata Air Mikro (Ha)								
	(TAM)									
019.059	Perlindungan	Persentase			0	0	0	0,06	0,089	148
	Lahan dan	Penurunan Kebakaran								
	Tanaman	Lahan dan Kebun (%)								
	Perkebunan									
019.060	Kegiatan	Persentase			0	0	0	2	0,02	1
	Pengendalian	Penurunan Hama								
	Hama dan	Dan Penyakit								
	Penyakit	Perkebunan (%)								
	Perkebunan									
019.061	Kegiatan	Jumlah Alat/Sarana			0	0	0	5	7	140
	Penyediaan Alat/	Produksi Perkebunan								
	Sarana Produksi	(Unit)								

	Perkebunan								
019.062	Kegiatan	Tersedianya STD-B		0	0	0	5	0	0
	Pemutakhiran	Pekebun (Kec)							
	Data Perkebunan								
021.	Program	Persentase	2	2,4	2,3	104	2,2	0,038	1,73
	Pencegahan dan	Penurunan angka							
	Penanggulangan	Kematian Ternak							
	Penyakit Menular	(%)							
	Ternak								
021.001	Kegiatan	Pembinaan Tempat		0	0	0	12	12	100
	Peningkatan Mutu	Pemotongan Hewan							
	Dan Keamanan	(Kali)							
	Pangan								
021.002	Kegiatan	Jumlah Pelayanan		32.000	29.402	92	32.010	14.128	44
	Pemeliharaan	Kesehatan Ternak							
	Kesehatan dan	(Ekor)							
	Pencegahan								
	Penyakit Menular								
	Ternak								
021.004	Kegiatan	Tersedianya		0	0	0	35	17	17
	Pembinaan	Sarana dan Prasarana							
	Sumber Daya	Keswan dan Kesmavet							
	Sarana, Prasarana	(%)							
	Keswan								
	Dan Kesmavet								
022	Program	Jumlah Peningkatan	4.624.734	4.268.202	4.241.303	99	4.446.468	4.368.432	98
	Peningkatan	Populasi Ternak							
	Produksi Hasil	(Ekor)							
	Peternakan/								
	Perkebunan	Jumlah Peningkatan	272..031	251.105	248.873	99	261.568	242.481,18	93
		Produksi Daging							
		Ruminansia (Kg)							
		Jumlah Peningkatan	1.241.858	998.901	950.154	95	1.113.774	961.702,91	86,35
		Produksi Daging							
		Unggas (Kg)							
022.001	Kegiatan	Jumlah Kelahiran		13	18	138	15	11	73
	Pengembangan	Ternak Bibit (Ekor)							
	Balai Pembibitan								
	Ternak								
022.008	Kegiatan	Jumlah Komoditas		0	0	0	14	6	43
	Pengembangan	Agribisnis							
	Agribisnis	Peternakan							
	Peternakan	(Komoditas)							
022.010	Kegiatan	Jumlah Akseptor		2.150	2.622	122	2.200	3.079	140
	Pengembangan	(Akseptor)							
	Inseminasi								
	Buatan (IB)								
022.013	Kegiatan	Pengembangan		3	4	133	3	0	0
	Pengembangan	Kelompok Budidaya							
	Budidaya Ternak	Ternak (Kelompok)							
023	Program	Jumlah Pelaksanaan		5	5	100	6	0	0
	Peningkatan	Pameran/Promosi							
	Pemasaran Hasil	Produk Perkebunan							
		(Kali)							

	Produksi	Terlaksananya			5	7	140	6	0	0
	Peternakan/	Promosi/Pameran								
	Perkebunan	Luar Daerah/Luar								
		Provinsi (Kali)								
023.007	Kegiatan Promosi	Jumlah Komoditas			7	6	86	0	0	0
	Atas Hasil	Untuk Promosi dan								
	Produksi	Pameran (Komoditas)								
	Peternakan									
	Unggulan Daerah									
023.012	Keg. Penguatan	Jumlah Operasional			2	1	50	0	0	0
	Fungsi Pasar	Hari Pasar Ternak								
	Ternak	(Kali)								
023.016	Pengembangan	Jumlah Alat/sarana								
	Pengolahan dan	Pengolahan Hasil			7	192	100	5	1	20
	Pemasaran Hasil	Perkebunan								
	Perkebunan	(Unit/Paket)								
025	Pengembangan	Persentase			33	33	100	35	17	49
	Sumber Daya	Tersedianya Sarana								
	Sarana dan	Dan Prasarana								
	Prasarana	Pertanian (%)								
	Pertanian									
025.002	Pembinaan	Persentase			33	33	100	35	18	51
	Sumber Daya	Tersedianya								
	Sarana Prasarana	Sarana dan Prasarana								
	Keswan dan	Keswan dan Kesmavet								
	Kesmavet	(%)								
026	Program	Persentase			0,11	0,83	13,26	0,06	0,089	148
	Perlindungan	PenurunanTingkat								
	dan Rehabilitasi	Kebakaran dan Hama								
	Lahan	Penyakit Perkebunan								
	Perkebunan	(%)								
		Persentase			2%	0,06%	3	2	0,02	1
		Penurunan Serangan								
		Hama dan Penyakit								
		Perkebunan								
		(%)								
026.001	Keg. Perlindungan	Persentase			0,11	0,83	13,26	0,06	0,089	148
	Lahan dan	Penurunan Kebakaran								
	Tanaman	Lahan dan Kebun (%)								
	Perkebunan									
026.002	Kegiatan	Persentase Penurunan			2	0,06	3	2	0,02	1
	Pengendalian	Hama dan Penyakit								
	Hama dan	Perkebunan (%)								
	Penyakit									
	Perkebunan									
029	Program	Jumlah Sampel			115	80	70	130	46	35
	Peningkatan	(Sampel)								
	Kesehatan Masy									
	Veteriner	Pembinaan Tempat								
		Pemotongan Hewan			3	12	400	12	12	100
		(Kali)								
029.001	Keg. Peningkatan	Pembinaan Tempat			3	12	400	12	12	100
	Mutu dan	Pemotongan Hewan								
	Keamanan	(Kali)								
	Pangan									

030	Program	Penerapan			1	1	100	1	1	100
	Penciptaan	Tekhnologi								
	Tekhnologi dan	Tekhnologi dan								
	Inovasi Pertanian	Inovasi Pertanian								
	Bidang Industri	Industri								
	Berkelanjutan	Berkelanjutan (Program)								
030.001	Kegiatan	Jumlah Produksi Hasil			120	13,50	11	180	13,5	7,5
	Pendampingan	Inovasi Pupuk								
	Inovasi Pertanian	Kompos (Ton)								
	Dan Program									
	Strategis Nasional									

Berdasarkan table Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020, yaitu:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020

Merupakan Realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 dikarenakan disaat penyusunan Ranwal Renja ini di awal Bulan Desember 2021 sedangkan Kegiatan Belum berakhir sehingga Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Tahun 2021 belum selesai dibuat dan juga didasarkan pada Renstra Perubahan 2016-2021.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020;

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan:

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Output : Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina
Target : 5 Kelompok Realisasi : 0%

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Daerah

Output : Jumlah dilaksanakannya Pameran/promosi atas Hasil Perkebunan Daerah
 Target : 5 Kali Realisasi : 0%

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Sarana Prasarana Keswan dan Kesmavet

Output : Tersedianya Sarana Keswan dan Kesmavet
 Target : 35% Realisasi : 17,5%

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Kegiatan Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)

Output : Luas Areal Pengolahan Tata Air Mikro (TAM)
 Target : 150 Ha Realisasi : 0 Ha

2. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Output : Jumlah Bibit Unggul yang dikembangkan
 Target : 1000 Batang Realisasi : 200 Batang (20%)

3. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Output : Jumlah Bibit Unggul yang disalurkan
 Target : 40.000 Batang Realisasi : 12.500 Batang

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan

1. Kegiatan Pengembangan Balai Pembibitan Ternak

Output : Jumlah Kelahiran Ternak Bibit
 Target : 15 Ekor Realisasi 11 Ekor

2. Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak

Output : Pengembangan Kelompok Budidaya Ternak
 Target : 3 Kelompok Realisasi 0 Kelompok

2. Realisasi Prgram/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome : Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran
 Target : 100% Realisasi : 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Target : 100% Realisasi : 100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome : Persentase Penyelesaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target : 100% Realisasi : 100%

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome : Persentase tersedianya Dokumen Renstra dan Dokumen Renja

Target : 100% Realisasi : 100%

5. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan

Outcome : Penerapan Teknologi

Target : 1 Inovasi

Realisasi : 1 Inovasi

6. Program Peningkatan Produksi (Pertanian/Perkebunan)

Outcome : 1. Produktivitas Kelapa Dalam (Kg/Ha) Target 1.167 Real : 1.156 (99,06)

2. Produktivitas Pinang (Kg/Ha) Target : 499 Real : 478 (95,79 %)

3. Produktivitas Kopi (Kg/Ha) Target : 510 Real : 543 (106,47%)

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan

Outcome : 1. Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)

Target : 4.446.468 Real : 4.368.432 (98,24%)

2. Jumlah Peningkatan Produksi Daging Ruminansia (Kg)

Target : 261.568 Realisasi : 242.481,18 (92,70%)

3. Jumlah Peningkatan Produksi Daging Unggas (Kg)

Target : 1.113.774 Realisasi : 961.702,91 (86,35%)

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Kegiatan Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan

Output : Persentase Penurunan Kebakaran Lahan dan Kebun

Target : 0,06% Realisasi 0,089% (148%)

2. Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan

Output : Persentase Penurunan Hama dan Penyakit Perkebunan

Target : 2% Realisasi : 0,02%

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan

1. Kegiatan Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)

Output : Jumlah Akseptor

Target : 2.200 Ekor Realisasi : 3.079 Ekor (139,95% Melebihi 100% atau

melebihi Target)

4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Terjadinya Rasionalisasi Anggaran OPD Tahun Anggaran 2020, Surat dari Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD pada tanggal 15 April 2020 Nomor : 050/821/TAPD/TJT/2020.
2. Point 1 diatas disebabkan terjadinya Pandemic Covid-19 yang menyebabkan Rasionalisasi Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran antara lain:
 1. Untuk Kegiatan yang keluarannya adalah aktivitas yang menghadirkan banyak orang seperti Kegiatan PENAS KTNA dan Kegiatan Promosi atau Pameran ditiadakan.
 2. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk : perjalanan dinas dalam/luar daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pada Pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)	16,67	33,33	50	66,67		0	60	67,20	

2.	Persentase Ketersediaan TAM (%)	16,67	33,33	50	66,67		0	60	67,20	
3.	Persentase Jalan Produksi (%)	16,67	33,33	50	66,67		0	60	67,20	
4.	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,16	0,14	0,12	0,1		0	0,24	0,12	
5.	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	2	2	1,8	1,8		0	1,9	1,9	
6.	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan (%)	35,71	50	64,29	78,57		0	65	79	
7.	Persentase Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (%)	2	22	42	62		0	43	63	
8.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0,29	0,29	0,29	0,29		0	0,29	0,29	
9.	Persentase Inseminasi Buatan (%)	33,47	46,78	60,08	73,39		0	61	74	
10.	Persentase Produksi HPT (%)	41,67	50	50,33	66,67		0	51	67	
11.	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,15	0,13	0,12	0,1		0	0,12	0,1	
12.	Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	40,65	48,78	56,91	65,04		0	57	66	
13.	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan (%)	35,71	50	64,29	78,57		0	65	79	

14.	Persentase Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (%)	2	22	42	62		0	43	63	
-----	---	---	----	----	----	--	---	----	----	--

Realisasi Capaian 2021 tidak dapat di isi karena Tahun Anggaran 2021 belum berakhir sehingga Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan belum disampaikan sedangkan untuk Tahun 2022 Program dan Kegiatan Belum Berjalan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pemerintah RI, 2009) mengamanatkan bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan atau pengobatan.

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan diemban oleh Pemerintah Pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka system kesehatan hewan nasional (Siskeswannas).

Sementara itu Pelayanan Kesehatan Hewan bagi petani-peternak dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) ada berbagai produk pelayanan yang sering dilakukan seperti pemberian vaksinasi; pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi; Inseminasi Buatan; disinfeksi; pengambilan sampel; pelayanan pemeriksaan hewan; pelayanan terpadu kesehatan hewan; dan pelayanan informasi. Oleh karena itu, Puskeswan dapat dianggap sebagai salah satu institusi strategis dalam upaya percepatan proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan. Akan tetapi, sejatinya hingga saat ini eksistensi dan peran Puskeswan boleh dikatakan masih belum optimal.

Secara garis besar ada tiga permasalahan mendasar yang dihadapi Puskesmas saat ini, yaitu: (1) belum lengkapnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana (infrastruktur); (2) belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia; dan (3) belum sempurnanya organisasi ketatalaksanaan (managemen). Bertitik tolak dari ketiga permasalahan tersebut penguatan kinerja Puskesmas diharapkan dapat mendukung Siskeswannas di Indonesia.

Penguatan Kinerja Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan hewan di lapangan perlu terus diupayakan. Secara global, langkah yang telah diambil beberapa Negara dalam implementasi “Veterinary authority” patut dijadikan acuan dalam mendukung implementasi otoritas veteriner di Indonesia. Secara khusus, kiprah Puskesmas dibawah kementerian Kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat perlu dijadikan rujukan lainnya dalam penguatan kinerja Puskesmas, termasuk didalamnya penataan organisasi dimana Kepala Puskesmas seyogyanya juga berstatus eselon sebagaimana status kepala Puskesmas. Hal ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Hal demikian cukup beralasan mengingat Puskesmas dan Puskesmas sama-sama berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Penguatan Kinerja Puskesmas secara tidak langsung diharapkan dapat menarik minat para tenaga dokter hewan untuk berkiprah memberikan sumbangsih tenaga dan Fikirannya di kawasan-kawasan pedesaan dan diharapkan dapat berkolaborasi secara sejajar dengan Petugas-Petugas Paramedis yang ada.

Sektor Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih didominasi oleh Perkebunan Kelapa dalam dan Kelapa Sawit. Komoditas Perkebunan yang perlu untuk didukung pengembangannya guna ditawarkan kepada Investor baik berupa perluasan penanaman komoditas bentuk pengolahan guna peningkatan nilai jual, antara lain komoditas pinang, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, lada dan kelapa hibrida.

Kelapa Dalam merupakan perkebunan rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jenis tanaman terbanyak dan terluas pada tahun 2017 seluas 58.521 Ha. Dengan Produksi sebesar 51.398 ton. Komoditi kelapa dalam ini diperdagangkan dalam bentuk kelapa bulat dan kopra yang merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa, bungkil, sabun dan margarin. Kesesuaian tanaman perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relative lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jambi yang ditunjukkan dengan produktivitas yang lebih besar. Dengan Demikian berdasarkan kriteria potensi produksi tersebut maka komoditi perkebunan yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah Kelapa Dalam.

Kelapa Sawit, berpedoman pada ketersediaan potensi sumber daya alam, arah kebijakan daerah daya dukung berinvestasi dan kecenderungan pasar komoditi perkebunan, maka ketersediaan peluang investasi pembangunan dan pengembangan Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai sebagai Investasi yang memiliki peluang besar. Komoditi perkebunan yang sesuai untuk dikembangkan dan dapat dijadikan andalan ekonomi adalah kelapa sawit dimana jenis tanaman perkebunan dengan luas tanaman 33.872 Ha, dengan produksi pada tahun 2017 sebesar 47.806 ton. Komoditi kelapa sawit sudah dikembangkan cukup luas terutama melalui pola perkebunan besar baik perusahaan perkebunan pemerintah maupun swasta. Dengan manajemen dan kelembagaan yang memadai maka untuk komoditi kelapa sawit lebih dikembangkan pada daerah selatan dan barat (hulu) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Komoditas Pinang, merupakan komoditi ekspor andalan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanaman ini merupakan tanaman substitusi selain kelapa dalam yang menunjang perekonomian masyarakat. Tanaman ini dijumpai hampir diseluruh wilayah dan dikembangkan hingga skala besar. Total luas lahan yang dimanfaatkan untuk fungsi

perkebunan pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2017 adalah sekitar 9.095 Ha, dengan komposisi 1.972 Ha belum menghasilkan 6.616 Ha sudah menghasilkan, dan 407 Ha merupakan tanaman tua/rusak. Produksi rata-rata komoditi pinang adalah sebesar 78 Kg/Ha, yang dilakukan oleh sebanyak 8.793 petani/pelaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisa Kebutuhan untuk Pelaksanaan Tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Progra m/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan belum diperoleh sehingga penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah belum bisa disajikan pada Tabel diatas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya Ketahanan Pangan Nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
4. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

7 Prioritas Nasional dalam RKP 2022 yaitu:

1. Pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental.
5. Meningkatnya Penyediaan infrastruktur layanan dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan public

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada **Prioritas Pertama yaitu Ekonomi.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan
Pada Renstra 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Dalam	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
			Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (%)	59,76	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Peningkatan Produksi Tanaman Kopi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
			Peningkatan Produksi Tanaman Pinang	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pinang (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
			Peningkatan Produksi Tanaman Coklat	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Coklat (%)	12,4	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
			Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,16	0,14	0,12	0,1	0,08	0,06

			Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	2	2	1,8	1,8	1,6	1,6
2.	Meningkatnya Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi (%)	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59
			Peningkatan Populasi Ternak Kambing	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing (%)	1,52	1,53	1,56	1,57	1,58	1,59
			Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras (%)	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59
			Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler (%)	1,42	1,60	1,61	1,63	1,64	1,65
			Peningkatan Populasi Ternak Itik	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Itik (%)	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59
			Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB)	Persentase Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB) (%)	1,10	1,12	1,15	1,17	1,18	1,20
			Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB)	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB) (%)	33,47	46,78	60,08	73,39	86,69	100
			Penurunan Angka Kematian Ternak	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	0,91	0,50	0,62	0,75	0,87	1
			Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet	Persentase Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Poin)	78	85	87	88,3	90	90

	Aparatur		Kinerja dan Keuangan							
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) (Poin)	74	75	76	77	78	80
				Laporan Keuangan sesuai SAP (Standard Akuntansi Pemerintahan)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4.	Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	Persentase Peningkatan PAD	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4	4	4	4	4	4
			Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4	4	4	4	4	4

3.3 Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

Jumlah Program ada 6 ; Kegiatan 16 dan Sub Kegiatan 29

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Kode ekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi (Poin)	88,3	6.785.684.457
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	81.859.400
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4.799.400
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	30.072.600
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	46.987.400
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah (%)	100	5.471.472.467
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	35	4.026.832.467
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1.444.640.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	98.600.000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	68.600.000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	30.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	307.719.738
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	42.880.000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	75.292.470
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	30.975.068
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	5.000.000

1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.190.000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	148.382.200
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	308.812.852
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diperlukan (Unit)	3	35.000.000
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	30	273.812.852
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	89.170.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4.570.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	84.600.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	428.050.000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	61	405.910.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	14	22.140.000
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Inseminasi Buatan (%)	73,39	1.287.800.950
		Persentase Produksi HPT (%)	66,67	
2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian (%)	100	220.463.450
2.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	12	220.463.450
2.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	534.425.100
2.2.1	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan, Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	534.425.100
2.3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota (%)	100	266.543.400
2.3.1	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan (Laporan)	1	266.543.400
2.4	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain (%)	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain (%)	100	266.369.000

	Kota Lain			
2.4.1	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (Dosis)	500	266.369.000
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)	66,67	2.711.870.078
		Persentase Ketersediaan TAM (%)	66,67	
		Persentase Jalan Produksi (%)	66,67	
3.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	2.453.034.228
3.1.1	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	2.453.034.228
3.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)	100	258.835.850
3.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	258.835.850
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,10	2.449.531.800
		Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/ Hasil Pangan Asal Hewan (%)	65,04	
4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/ Hasil Pangan Asal Hewan (%)	100	2.316.745.500
4.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2.316.745.500
4.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	100	132.786.300
4.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	132.786.300
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,10	219.222.700
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	1,8	
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)	100	219.222.700
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	113,09	65.400.200
5.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Ha)	2036	153.822.500

6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	0,49	253.406.800
6.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	100	253.406.800
6.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	253.406.800
				13.707.516.785

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Rangka Mencapai Visi Jangka Menengah Daerah. Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indicator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan Rangkaian Kegiatan yang Simultan dengan Penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penyusunan APBD.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Peternakan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V PENUTUP

Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang banyak diusahakan oleh masyarakat, oleh karenanya pembangunan Perkebunan dan Peternakan merupakan hal yang benar-benar menjadi perhatian. Letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sangat strategis yang berada dekat kawasan Segitiga Ekonomi Asia Tenggara (SIJORI) dan termasuk dalam Regional Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle (IMS-GT) akan memberikan peluang pasar yang besar untuk industri olahan hasil Perkebunan dan Peternakan.

Mengingat banyaknya permintaan/usulan petani melalui Kelompok Tani kepada Pemerintah Kabupaten dan atau khususnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengembangkan komoditi unggulan perkebunan dan populasi ternak unggul dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya.

Dengan keterbatasan modal yang dimiliki petani serta keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk merealisasikan keinginan masyarakat, untuk itu diharapkan bantuan dana dari APBD Provinsi Jambi dan APBN Pusat dapat dialokasikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan untuk memfasilitasi kegiatan lainnya diupayakan biayanya dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Akhir kata semoga Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat bermanfaat pada masa yang akan datang.

Demikian Dokumen Renja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.